

BAB IV

KESIMPULAN

Skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) telah memunculkan tekanan besar bagi Malaysia, baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional, untuk memperbaiki integritas tata kelola pemerintahannya. Kasus ini melibatkan penyalahgunaan dana publik dalam jumlah besar melalui jaringan yang kompleks, yang tidak hanya memperberat beban utang negara, tetapi juga memicu krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kondisi ini mencerminkan lemahnya penerapan prinsip *good governance* pada periode awal penelitian (2015–2017), yang terlihat dari penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari 50 pada 2015 menjadi 47 pada 2017, serta menurunnya tiga dimensi utama dalam *Worldwide Governance Indicators* (WGI), yaitu *Control of Corruption* sebesar -7,69%, *Government Effectiveness* sebesar -6,19%, dan *Rule of Law* sebesar -4,02%. Penurunan tersebut menunjukkan kemunduran pada integritas sektor publik, efektivitas birokrasi, dan supremasi hukum di Malaysia.

Situasi mulai berubah setelah pergantian pemerintahan pada 2018, ketika Malaysia mulai menerapkan sejumlah reformasi penting. Transparansi ditingkatkan melalui pembukaan akses publik terhadap laporan audit 1MDB dan dokumen resmi Komite Parlemen. Akuntabilitas diperkuat dengan penuntutan terhadap Najib Razak, pejabat terkait, dan pihak eksternal seperti Goldman Sachs. Integritas diperbaiki melalui peluncuran *National Anti-Corruption Plan (NACP) 2019–2023* dan peninjauan kembali *Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC)*. Partisipasi publik juga lebih diakomodasi dengan memberikan akses kepada masyarakat dan media terhadap informasi, sementara tanggung jawab negara terlihat dalam pengakuan atas utang 1MDB dan pembentukan Tabung Harapan untuk membantu melunasi beban tersebut.

Upaya-upaya ini berdampak positif terhadap indikator tata kelola. Skor IPK meningkat dari 47 pada 2017 menjadi 53 pada 2019, dan dimensi WGI menunjukkan perbaikan, dengan *Control of Corruption* naik 11,8%, *Government Effectiveness* naik 5,9%, serta *Rule of Law* naik 5,3% pada periode 2018–2019. Peningkatan ini mencerminkan pulihnya sebagian kepercayaan internasional, menguatnya kapasitas kelembagaan, dan membaiknya kualitas penegakan hukum di Malaysia.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta pasca-2018 telah membawa perbaikan parsial terhadap tata kelola pemerintahan. Walaupun arah perubahannya positif, keberlanjutan reformasi masih menghadapi tantangan, khususnya dari dinamika politik dan hukum yang belum stabil di Malaysia.

